

## ANALISIS EKSISTENSI HASHIM SUJONO DJOJHADIKUSUMO DALAM PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA: STUDI KASUS KEPEMILIKAN HPH DAN HGB DI KALIMANTAN TIMUR

Khairunisa Putri<sup>1</sup>, Hafiz Zaki Hanifan<sup>2</sup>, Pramadito Rasendriya D<sup>3</sup>, Salma Zulfa Nur Habibah<sup>4</sup>, Fatkhuri<sup>5</sup>

[2310413078@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310413078@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup> [2310413049@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310413049@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>  
[2310413072@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310413072@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup> [2310413045@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310413045@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>4</sup>  
[fatkhuri@upnvj.ac.id](mailto:fatkhuri@upnvj.ac.id)<sup>5</sup>

### ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji tentang eksistensi Hashim Djojohadikusumo yang memiliki posisi sebagai pemilik perusahaan besar yaitu Arsari Group serta Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya. Studi kasus penelitian ini membahas mengenai kepemilikan lahan Hashim Djojohadikusumo di Kalimantan Timur yang di samping itu juga letak Ibu Kota Negara (IKN) bertepatan di lahan Hashim Djojohadikusumo. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi isu-isu yang belum banyak diteliti atau dibahas oleh pihak lain. Pendekatan penelitian yang dilakukan ini yaitu kualitatif dengan kajian literatur. Penelitian ini menggunakan teori Elitisme oleh Wright Mills sebagai pisau analisis. Temuan dari penelitian ini yaitu adanya berbagai konsesi di kawasan IKN ini mencerminkan dominasi oligarki dalam sebuah kebijakan yang dibangun pemerintah tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

**Kata Kunci:** Hashim Sujono Djojohadikusumo; Ibu Kota Nusantara (IKN); Konsesi kawasan hutan

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Penelitian ini membahas eksistensi Hashim Sujono Djojohadikusumo, seorang pengusaha besar sekaligus figur yang memiliki kedekatan erat dengan lingkaran kekuasaan di Indonesia. Hashim adalah adik kandung Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029. Kedekatan ini memberikan pengaruh signifikan terhadap keterlibatannya dalam berbagai strategi

kebijakan nasional, termasuk proyek besar seperti pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur. Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah kepemilikan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh Hashim, melalui perusahaan yang dimilikinya, PT ITCI Kartika Utama.

Hashim tercatat sebagai pemilik konsesi HPH seluas 173.395 hektare di kawasan IKN, khususnya di Ring Dua, yang merupakan zona strategis dalam

pembangunan ibu kota baru. Perusahaan ini berada di bawah naungan Arsari Group, konglomerasi bisnis milik Hashim.<sup>1</sup> Selain itu, PT ITCI Kartika Utama juga mengantongi sertifikat HGB di Kelurahan Maridan dan Desa Telemow, Kecamatan Sepaku. Kedua lokasi ini berada di zona inti IKN Nusantara, menjadikannya bagian penting dari proyek pembangunan ibu kota.<sup>2</sup> Prabowo Subianto, yang kini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, menyatakan bahwa dirinya juga berperan sebagai investor dalam proyek IKN.

Keterlibatan langsung Hashim melalui Arsari Group dalam pengelolaan lahan strategis menimbulkan banyak pertanyaan terkait transparansi dan pengaruh oligarki dalam kebijakan publik. Fakta bahwa perusahaan ini telah mengelola konsesi sejak era Orde Baru memperkuat narasi bahwa rencana pemindahan IKN tidak lepas dari kepentingan kelompok elit dan korporasi besar.

Terlebih lanjut lagi, aktivitas perusahaan ini sempat meredup setelah reformasi 1998. Namun, setelah pemerintah menetapkan Penajam Paser Utara sebagai lokasi IKN pada Februari 2022, PT ITCI Kartika Utama kembali aktif dan memegang peranan strategis

karena wilayah konsesinya termasuk dalam kawasan inti pembangunan IKN.

Berdasarkan laporan Koran Tempo edisi 18 Agustus 2023, Nicholay Aprilindo, Public Affair & Government Relation Arsari Group, menyatakan bahwa PT ITCI Kartika Utama juga memegang Hak Guna Bangunan (HGB) di Kelurahan Maridan dan Desa Telemow, Kecamatan Sepaku, yang berada dalam kawasan inti IKN.<sup>3</sup>

Lahan HGB tersebut merupakan tanah negara yang izin pengelolaannya diberikan kepada perusahaan melalui prosedur resmi. Izin HGB ini awalnya berakhir pada tahun 2014 tetapi telah diperpanjang hingga tahun 2037 sesuai aturan perundang-undangan.

Walau perusahaan ini memiliki HGB sejak lama, keberadaannya sempat melemah pasca reformasi. Beberapa warga lokal bahkan menyebut PT ITCI Kartika Utama "mati suri" hingga munculnya kebijakan pembangunan IKN. Aktivitas perusahaan kembali meningkat setelah ditetapkannya Penajam Paser Utara sebagai lokasi IKN. Hal ini menarik perhatian karena menunjukkan hubungan erat antara kebijakan pemerintah dan pengaruh korporasi di kawasan strategis tersebut.

Pemindahan IKN merupakan salah satu kebijakan terbesar dalam

<sup>1</sup> Project Multatuli. (2022, Agustus 1). Nestapa Suku Balik: Dulu Hutannya Digunduli, Kini Hidupnya Digusur IKN. Retrieved 23 November 2024 from <https://projectmultatuli.org/nestapa-suku-balik-dulu-hutannya-digunduli-kini-hidupnya-digusur-ikn/>

<sup>2</sup> Tempo. (2024, Agustus 13). Prabowo Mengaku Investor, Hashim Djojohadikusumo

Punya Proyek di IKN. Retrieved 23 November 2024 from

<https://www.tempo.co/ekonomi/prabowo-mengaku-investor-hashim-djojohadikusumo-punya-proyek-di-ikn-26073>

<sup>3</sup> *Ibid.*

sejarah Indonesia yang didasari oleh pertimbangan bahwa Jakarta sudah terlalu padat dan tidak lagi dapat mendukung fungsi administratif dan pemerintahan secara optimal. Pemindahan IKN ini dipandang sebagai solusi jangka panjang untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta sebagai pusat ekonomi, politik, dan pemerintahan Indonesia.<sup>4</sup>

Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur diumumkan secara resmi pada 26 Agustus 2019 oleh Presiden Joko Widodo.<sup>5</sup> Proyek ini mencakup total area seluas 180.965 hektare, yang dibagi menjadi tiga zona: Ring Satu (5.644 hektare) sebagai Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, Ring Dua (42.000 hektare) sebagai Kawasan IKN, dan Ring Tiga (133.321 hektare) untuk perluasan.<sup>6</sup> Di samping itu juga, terdapat beberapa keberadaan konsesi kehutanan, di antara berbagai konsesi lahan, PT ITCI Kartika Utama menjadi salah satu penguasa dominan di Ring Dua yang diketahui memiliki hubungan dengan Hashim Djojohadikusumo, seorang tokoh bisnis dan politik berpengaruh di Indonesia.<sup>7</sup>

Hashim Djojohadikusumo bukan sekadar pemilik lahan di kawasan IKN. Dengan kedudukannya sebagai Komisaris Utama PT ITCI Kartika Utama dan pemimpin Arsari Group, ia memiliki akses langsung ke peluang-peluang bisnis strategis yang terkait dengan pembangunan ibu kota baru. Proyek ini berpotensi menjadi sumber keuntungan besar, terutama dalam penyediaan air bersih dan pemanfaatan sumber daya hutan yang dikelola perusahaan. Selain itu, keterlibatan langsung Hashim juga mempertegas isu oligarki dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan pembangunan.

Beberapa analis menilai bahwa proyek IKN dapat menjadi pintu masuk bagi korporasi besar untuk memperluas kekuasaan ekonomi mereka, mengorbankan hak masyarakat lokal dan lingkungan. Hal ini didukung oleh fakta bahwa banyak dari lahan di kawasan IKN telah dikuasai oleh izin-izin kehutanan, tambang, dan perkebunan jauh sebelum proyek ini diumumkan.

Terdapat penelitian terdahulu yang memberikan kontribusi penting bagi penulis dalam *state of the arts* dalam

---

<sup>4</sup> Nadila, R. (2024). Displacement and Gentrification in Borneo – The Political Ecology of Indonesia's New Capital City. *Uppsala University, Faculty of Medicine, Master's Program in Implementation Science, Transformational Learning and Sustainability*, h 5-6

<sup>5</sup> Detiknews. (2022, Januari 19). Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak Pemindahan Ibu Kota: UU IKN Cacat Prosedural. Retrieved 23 November 2024 from <https://news.detik.com/berita/d-5906003/koalisi-masyarakat-kaltim-tolak-pemindahan-ibu-kota-uu-ikn-cacat-prosedural>

<sup>6</sup> TrendAsia. (2020, September 13). Ibu Kota Baru Buat Siapa?. Retrieved 23 November 2024 from <https://trendasia.org/ibu-kota-baru-buat-siapa/>

<sup>7</sup> Tempo. (2022, Januari 29). Koalisi Sebut Nama Adik Prabowo dalam Perusahaan Pemegang Konsesi 173 Ribu Hektare di IKN. Retrieved 23 November 2024 from <https://www.tempo.co/ekonomi/koalisi-sebut-nama-adik-prabowo-dalam-perusahaan-pemegang-konsesi-173-ribu-hektare-di-ikn-430702>

penelitian penulis. Penelitian yang pertama menjadi referensi penulis adalah artikel karya Sulikah Asmorowati, Charisma Husniati, dan Dwi Retno Ayu (2022) yang berjudul “Peran Policy Entrepreneur dalam Pembangunan Ibu Kota Negara”.<sup>8</sup> Penelitian ini menyoroti peran *policy entrepreneurs* sebagai agen perubahan dalam kebijakan publik, khususnya terkait proyek strategis nasional seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan *policy entrepreneurs* dalam pembangunan IKN masih belum signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya kebijakan yang mampu menjembatani berbagai kepentingan antara pemerintah, masyarakat lokal, dan investor. Hambatan utama yang ditemukan meliputi minimnya advokasi kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan, lemahnya partisipasi masyarakat adat, dan keterbatasan akses terhadap IKN bagi masyarakat luas. Kelebihan dari penelitian ini adalah fokusnya pada pentingnya peran aktor kebijakan dalam memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan.

Penelitian ini juga memberikan pandangan strategis tentang bagaimana *policy entrepreneurs* dapat menggerakkan proses kebijakan dengan memobilisasi dukungan publik, memperkenalkan inovasi, dan membangun jaringan kolaborasi. Namun,

kekurangan penelitian ini adalah tidak menyoroti secara langsung pengaruh tokoh-tokoh ekonomi-politik besar yang memiliki peran dominan dalam kebijakan strategis nasional, seperti individu dengan kekuatan oligarki.

Persamaan penelitian Sulikah Asmorowati dkk. (2022) dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas aktor yang berperan penting dalam pembangunan IKN. Perbedaan antara kedua penelitian adalah penelitian Sulikah menyoroti peran *policy entrepreneurs* sebagai agen perubahan yang inovatif dan inklusif, sementara penelitian penulis berfokus pada keterlibatan Hashim Sujono Djojohadikusumo sebagai tokoh oligarki yang memengaruhi kebijakan publik melalui dominasi ekonomi-politik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *policy entrepreneurship* untuk menganalisis pelibatan berbagai aktor dalam kebijakan pembangunan. Sebaliknya, penelitian penulis mengkaji dominasi oligarki dalam pengambilan kebijakan strategis dengan menggunakan teori elitisme Wright Mills, sehingga memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang dampak struktur kekuasaan terhadap pembangunan IKN.

### Rumusan Masalah

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur merupakan salah satu proyek strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan

<sup>8</sup> Asmorowati, S., Husniati, C., & Ayu, D. R. (2023). PERAN POLICY ENTREPRENEUR

DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA. Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS), 1(1), 202-206.

pemerataan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Namun, di balik rencana ambisius tersebut, muncul berbagai persoalan terkait penguasaan lahan, terutama konsesi yang melibatkan korporasi besar seperti PT ITCI Kartika Utama yang berada di bawah naungan Arsari Group milik Hashim Sujono Djojohadikusumo.

Sebagai pengusaha besar sekaligus adik dari Presiden Prabowo Subianto, keterlibatan Hashim dalam kepemilikan lahan strategis di kawasan IKN memunculkan sejumlah isu, seperti adanya dominasi oligarki. Maka dari itu penelitian ini memiliki *research question* sebagai berikut: Bagaimana keterlibatan Hashim Djojohadikusumo yang mencerminkan pola dominasi oligarki dalam strategi pengelolaan proyek di kawasan IKN?

### TELAAH LITERATUR

Penelitian yang dilakukan oleh Sulikah Asmorowati, Charisma Husniati, dan Dwi Retno Ayu (2022), yang berjudul “Peran Policy Entrepreneur dalam Pembangunan Ibu Kota Negara”.<sup>9</sup> Penelitian ini membahas bagaimana policy entrepreneurs, sebagai agen perubahan, dapat berperan strategis dalam mendukung formulasi dan implementasi kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Penelitian tersebut menemukan bahwa peran policy entrepreneurs dalam pembangunan IKN masih belum signifikan. Sebagai agen kebijakan,

policy entrepreneurs memiliki kemampuan untuk memobilisasi dukungan masyarakat, menciptakan inovasi kebijakan, dan menjembatani berbagai kepentingan, baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat lokal.

Namun, penelitian ini juga menyoroti bahwa agenda pemerintah untuk melibatkan aktor-aktor tersebut dalam pembangunan IKN belum optimal. Pemerintah lebih terfokus pada upaya menarik investasi dan membangun infrastruktur tanpa memastikan keterlibatan masyarakat adat serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, advokasi kebijakan berkelanjutan dan agenda yang mendorong partisipasi aktif masyarakat juga masih sangat minim.

Kelebihan dari penelitian ini adalah kemampuannya untuk memberikan gambaran strategis tentang bagaimana peran policy entrepreneurs dapat meningkatkan keberlanjutan pembangunan IKN. Penelitian ini menekankan pentingnya inovasi kebijakan yang inklusif, melibatkan aktor dari berbagai sektor, dan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan pendekatan policy entrepreneurship, artikel ini mampu memberikan solusi teoretis untuk menciptakan kebijakan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Namun, penelitian ini memiliki kekurangan, terutama karena tidak membahas secara langsung pengaruh tokoh ekonomi-politik besar yang kerap

---

<sup>9</sup> *ibid.*,8

mendominasi kebijakan publik, seperti individu dengan kekuasaan oligarki. Pendekatan yang digunakan cenderung normatif dan kurang memperhatikan bagaimana aktor-aktor tertentu, yang memiliki kekuasaan besar melalui kendali sumber daya ekonomi dan politik, dapat memengaruhi arah kebijakan strategis.

Persamaan antara penelitian Sulikah dkk. dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya sama-sama membahas peran penting aktor dalam pembangunan IKN. Penelitian Sulikah menyoroti pentingnya peran policy entrepreneurs dalam mendorong keberlanjutan pembangunan, sedangkan penelitian penulis mengangkat peran individu yang memiliki kekuasaan ekonomi-politik besar, seperti Hashim Sujono Djojohadikusumo, yang menjadi salah satu aktor kunci dalam pengelolaan lahan strategis di kawasan IKN.

Perbedaan utama terletak pada fokus dan pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian Sulikah lebih menekankan pada peran inovasi kebijakan untuk menciptakan inklusivitas dan keberlanjutan, sedangkan penelitian ini mendalami bagaimana dominasi oligarki dapat membentuk kebijakan strategis yang sering kali mengabaikan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Penelitian Sulikah menjadi penting untuk memberikan landasan tentang peran aktor kebijakan dalam pembangunan IKN. Namun, terdapat research gap dalam literatur yang membahas secara mendalam pengaruh

individu atau kelompok dengan kekuasaan besar terhadap kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan fokus pada bagaimana dominasi ekonomi-politik, melalui peran Hashim Sujono Djojohadikusumo, memengaruhi arah kebijakan pembangunan IKN.

Melalui pendekatan teori elitisme Wright Mills, penelitian ini akan menggambarkan bagaimana struktur kekuasaan memungkinkan individu dengan kendali ekonomi yang besar untuk mendominasi proses kebijakan strategis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan perspektif baru tentang relasi antara kekuasaan dan kebijakan, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan transparansi, inklusivitas, dan keberlanjutan dalam pembangunan IKN.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan literatur kebijakan publik di Indonesia, khususnya dalam memahami dinamika kekuasaan dalam proyek-proyek nasional berskala besar.

## **LANDASAN TEORI**

### **Teori Elitisme - Wright Mills**

Elitisme yang dikemukakan oleh Charles Wright Mills, seorang tokoh terkemuka dalam bidang sosiologi dan ilmu politik adalah teori elit kekuasaan yang menjelaskan kekuasaan dalam masyarakat modern disegel pada segelintir orang yang ia sebut sebagai "elite kekuasaan" (elit kekuasaan). Elite ini terdiri dari individu-individu yang mendominasi tiga institusi utama di

Amerika Serikat: militer, korporasi besar, dan pemerintah.<sup>10</sup>

Keputusan-keputusan yang diambil oleh kekuasaan ketiga ini mempengaruhi kehidupan seluruh masyarakat yang berada pada jenjang kekuasaan lebih rendah. Terdapat dua faktor utama yang melatarbelakangi munculnya kekuasaan elite. Pertama, alat pengendalian dan kekerasan yang kini memiliki skala dan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan masa lampau. Kedua, adanya ketergantungan timbal balik di antara elite yang merupakan hasil dari struktur sosial yang telah terbentuk sepanjang sejarah, di mana tingkat dan bentuk sentralisasi institusi ekonomi, militer, dan politik mencapai tingkat yang signifikan.

Kelompok elit juga dapat dimaknai sebagai unit kesadaran diri yang terorganisasi secara kohesif. Struktur kesatuan ini bertumpu pada tiga unsur utama, yaitu kesamaan psikologis, interaksi sosial, dan kesamaan kepentingan. Keserupaan dalam interaksi akan menghubungkan mereka karena sebagai kelompok yang saling terkait, mereka terlibat dalam jaringan kelompok yang saling tumpang tindih dan memiliki hubungan yang kompleks.

Individu di lingkaran tertinggi dipahami sebagai bagian dari lapisan sosial paling atas, sebuah kerangka kelompok yang anggotanya saling memahami dan memiliki hubungan erat

satu sama lain. Dalam perspektif ini, kelompok elite menyadari eksistensi mereka sebagai satu kesatuan sosial dan psikologis yang kokoh. Mereka tidak hanya membentuk kesatuan, tetapi juga mengembangkan identitas bersama sebagai bagian dari kelas sosial yang memiliki kesadaran kolektif.

### **Oligarki**

Oligarki berakar dari bahasa Yunani Kuno, "Oligarchia", yang secara harfiah merujuk pada sistem pemerintahan yang dikuasai oleh segelintir orang. "Oligo" mengacu pada jumlah yang sedikit, sementara "archein" berarti memerintah. Singkatnya, oligarki adalah sistem politik di mana kekuasaan terkonsentrasi pada kelompok elit yang jumlahnya terbatas. Oligarki merupakan sistem pemerintahan plutokratik di mana kekuasaan politik secara langsung berkorelasi dengan kekayaan ekonomi. Semakin besar kekayaan seseorang atau kelompok, semakin besar pula pengaruhnya dalam pengambilan keputusan politik.<sup>11</sup>

Menurut Aristoteles, kekuasaan dalam oligarki terkonsentrasi di tangan segelintir elit yang lebih peduli pada pemenuhan hasrat pribadi ketimbang aspirasi masyarakat luas. Kemudian Jeffrey Winter memperjelas bahwa kekayaan bukan hanya alat untuk mencapai kekuasaan dalam sistem oligarki, melainkan juga menjadi tujuan

<sup>10</sup>Maftuh, M. (2023). ANATOMI TEORI ELIT KEKUASAAN C. WRIGHT MILLS. MIYAH: Jurnal Studi Islam, 19(02), 227.

<sup>11</sup> Leonard Whibley. (1896). Greek Oligarchies Their Character And Organisation, Methuen & Co, Newyork, page 18.

utama yang dipertahankan dengan segala cara.<sup>12</sup> Zainal Arifin Mochtar, dosen hukum tata negara di UGM, menjelaskan bahwa oligarki merupakan sub kelompok dari kelompok elit. Tidak semua individu dalam kelompok elit memiliki kekuasaan yang terkonsentrasi dalam struktur oligarki.<sup>13</sup>

Konsep oligarki telah dijelaskan oleh banyak ahli dengan berbagai sudut pandang, namun pada dasarnya oligarki tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga mekanisme yang digunakan untuk mempertahankan dominasi, baik melalui kontrol terhadap sumber daya ekonomi, pengaruh dalam institusi politik, maupun strategi untuk meminggirkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

### Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan, menurut Agustino (2016:97), merujuk pada proses perumusan kebijakan yang merupakan bagian dari tahap awal pembuatan keputusan kebijakan.<sup>14</sup> Agustino menjelaskan bahwa formulasi kebijakan mencakup dua aktivitas utama: pertama, perancangan tujuan kebijakan yang berkaitan dengan rumusan masalah kebijakan; kedua, strategi pencapaian tujuan kebijakan. Sidney (2007:79) dalam

Agustino (2016:97) menyatakan bahwa formulasi kebijakan merupakan bagian dari tahap awal dalam proses pembuatan keputusan kebijakan.<sup>15</sup> Formulasi kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh Hamdi (2014:87), adalah proses yang melibatkan perumusan pilihan-pilihan atau alternatif kebijakan dalam pemerintahan.

Proses ini merupakan tahap fundamental dalam siklus kebijakan publik, di mana tujuan dan strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan dirancang dan disusun. Tjokroamidjojo mendefinisikan proses merumuskan kebijakan sebagai rangkaian dinamis pemilihan berbagai opsi yang berkelanjutan, termasuk di dalamnya pengambilan keputusan.<sup>16</sup>

Konsep formulasi kebijakan telah dijelaskan oleh banyak ahli dengan berbagai sudut pandang, namun pada dasarnya formulasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan publik yang berfungsi untuk merumuskan tujuan, strategi, dan alternatif kebijakan guna mengatasi masalah yang dihadapi.

## METODE PENELITIAN

### Objek Penelitian

Moleong (1989) mengungkapkan bahwa dalam penelitian, penting untuk

<sup>12</sup> Prijanto Rabani. (2023, September 8). Opini “Pemerintahan Oligarki, Aristoteles dan Jeffrey Winters”. gokepri.com. Retrieved 23 November 2024 from <https://gokepri.com/pemerintahan-oligarki-aristoteles-dan-jeffrey-winters/>

<sup>13</sup> Wahyuni, W. (2022, March 3). Pemilu 2024 dan ciri-ciri sistem pemerintahan oligarki. Hukumonline. Retrieved 23 November 2024 from

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-jenis-oligarki-lt63dc73d43f631/>

<sup>14</sup> Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik (edisi revisi). Bandung: ALFABETA, page 97.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Islamy, Irfan, Muhammad. (2014). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. (Jakarta: PT Bumi Aksara), h. 24.

menetapkan batasan antara objek dan subjek.<sup>17</sup> Objek dipandang sebagai isu, permasalahan, atau kasus yang dikaji, diteliti, serta dieksplorasi, atau dengan kata lain, objek adalah fokus utama dalam penelitian. Sementara itu, subjek, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (1989) dalam Mardawani (2020), Merujuk pada individu atau pihak yang menjadi sumber informasi dan data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian.

Penelitian ini fokus pada analisis eksistensi Hashim Sujono Djojohadikusumo dalam transfer Ibu Kota Negara (IKN), khususnya terkait kepemilikan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kalimantan Timur. Objek penelitian yang digunakan adalah Hashim Sujono Djojohadikusumo sebagai aktor yang berperan ganda, yaitu sebagai pengusaha yang memimpin Arsari Group dan sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Pemilihan Hasyim sebagai objek penelitian didasarkan pada posisi yang strategis dalam politik dan bisnis, terutama kaitannya dengan kebijakan transfer IKN. Hashim dianggap memiliki pengaruh yang signifikan dalam konteks pemindahan IKN karena keterlibatannya dalam berbagai proyek di Kalimantan Timur yang berpotensi berkaitan langsung dengan lahan yang diperlukan untuk pembangunan IKN. Selain itu, posisinya di Gerindra memberi dimensi politik yang menarik, mengingat partai

ini merupakan salah satu pendukung utama kebijakan pemindahan IKN.

Penelitian terdahulu yang membahas peran pengusaha dalam kebijakan transfer IKN belum banyak mengangkat aspek politik sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengisi selubung tersebut dengan fokus pada bagaimana Hashim menggunakan pengaruhnya dalam proses ini.

### **Jenis Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian literatur. Alan Bryman (2012: 423), pendekatan penelitian kualitatif lebih fokus pada penggunaan kata-kata dan makna daripada pada aspek kuantifikasi dalam proses pengumpulan serta analisis data.

Metode ini dipilih oleh peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana keterlibatan Hashim Djojohadikusumo dapat mencerminkan dominasi oligarki dalam pengelolaan proyek di kawasan IKN.

Mengingat kompleksitas peran yang dimainkan oleh aktor-aktor politik dalam proses ini. Peneliti berfokus pada proses, pengalaman, serta pemahaman terhadap objek yang diteliti, oleh karena itu, metode kualitatif dipilih sebagai pendekatan dalam penelitian ini.

---

<sup>17</sup> Moleong. (1989). Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Karya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksploratif dikarenakan peneliti berusaha menggali isu-isu yang belum banyak diteliti atau dibahas oleh pihak lain. Topik yang dibahas dalam penelitian ini tergolong jarang dianalisis, sehingga hasil yang ditemukan di lapangan sulit diprediksi. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif eksploratif (Moleong, 2014).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiarto (2017), data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber yang bukan merupakan sumber primer. Data ini biasanya berupa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Data penelitian ini dikumpulkan dari sumber sekunder yang relevan seperti buku, jurnal akademis, dokumen pemerintah, dan media massa. Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengumpulkan berbagai data dan informasi dengan cara membaca, mempelajari, menganalisis, serta menelaah buku-buku yang terkait dengan eksistensi Hashim Djojohadikusumo dan kebijakan pemindahan IKN.

### **Teknik Analisis Data**

Model analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model Miles dan Huberman, yang merupakan salah satu pendekatan kualitatif yang sering digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian sosial. Model ini dirancang untuk memberikan struktur

yang sistematis dalam mengorganisir dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari lapangan. Model Miles dan Huberman terdiri dari tiga tahapan utama yang saling terkait, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

#### **1. Reduksi Data (Data Reduction)**

Tahapan ini mencakup langkah-langkah untuk memilah, menyaring, dan memusatkan perhatian pada data yang dikumpulkan agar lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Pada proses reduksi data, penulis akan mengidentifikasi informasi yang esensial, menyaring data yang tidak terkait, serta mengelompokkan data sesuai kategori atau tema yang muncul.

#### **2. Penyajian Data (Data Display)**

Pada tahap ini, penulis menyusun data yang telah dipilih dan dikonsentrasikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami serta dianalisis. Penyajian data dapat dilakukan dalam narasi deskriptif.

#### **3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)**

Tahap akhir dari model Miles dan Huberman adalah kesimpulan menarik dari data yang telah dijelaskan. Penulis akan menginterpretasikan atau membuat generalisasi berdasarkan hasil analisis, menghubungkannya dengan teori atau literatur yang relevan, serta memverifikasi temuan untuk memastikan

keabsahan dan validitasnya. Proses verifikasi ini dilakukan dengan meninjau ulang data yang ada, melakukan triangulasi (perbandingan dengan sumber lain) guna memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik benar-benar menggambarkan kenyataan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Keterlibatan Hashim Djojohadikusumo yang Mencerminkan Pola Dominasi Oligarki Dalam Strategi Pengelolaan Proyek di Kawasan IKN**

Pemerintah Indonesia berencana memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang akan dikenal dengan nama Nusantara. Proses transfer ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan yang telah melalui studi kelayakan yang dilakukan oleh pemerintah, serta didukung oleh landasan hukum berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 mengenai Ibu Kota Negara Nusantara.<sup>18</sup> UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi dasar dalam pelaksanaan rencana besar strategi nasional ini.

Hal ini juga mencakup regulasi lanjutan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No.12 Tahun 2023 yang mengatur

tentang pemberian izin usaha, kemudahan, serta fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di IKN. Kenyataannya undang-undang tersebut ditolak oleh warga adat dan masyarakat yang tidak dilibatkan dalam proses pembuatan undang-undang.<sup>19</sup>

Terlihat jelas bahwa rencana pemindahan IKN yang dimulai dari pembentukan UU IKN saja dari awal sudah tidak melibatkan masyarakat adat, padahal masyarakat adat inilah yang seharusnya ikut dilibatkan dikarenakan mereka yang akan merasakan dampak langsung dari adanya pembangunan IKN ini.

Pembangunan IKN harus dilakukan partisipasi publik, proyek sebesar ini tentu jika tanpa transparansi dan diskusi dengan masyarakat akan menimbulkan tekanan dan penderitaan yang akan dirasakan oleh masyarakat lokal disana. Tentu saja argumen ini diperkuat oleh adanya kajian yang dilakukan oleh WALHI mengenai aspek lingkungan.<sup>20</sup>

Terdapat tiga permasalahan yang akan timbul di kawasan IKN ini diantaranya adanya risiko kerusakan tata air dan iklim; kedua, flora dan fauna akan tandas; ketiga, rusaknya lingkungan hidup. Ketiga permasalahan ini tentu saja yang sangat merasakan dampak dan dirugikan oleh atas dampak tersebut yaitu warga lokal disana. Warga lokal tentu

<sup>18</sup> Komnas, H. A. M. Kertas Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru dalam Perspektif Kota Hak Asasi Manusia. Komnas HAM.

<sup>19</sup> lembaga Peradaban Luhur. (2022, April 24). Menggugat UU IKN, dari Hak Adat Sampai

Kerusakan Lingkungan. Retrieved 25 November 2024 from <https://www.peradabanluhur.or.id/menggugat-uu-ikn-dari-hak-adat-sampai-kerusakan-lingkungan/>

<sup>20</sup> *Ibid.*

akan merasakan krisis ketersediaan air bersih, polusi, serta kekeringan. Terlebih parahnya lagi, lahan dan tanah mereka disana akan terkena imbas atas pembangunan IKN ini.

Di lain sisi, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan sendiri bahwa ia telah memiliki lahan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum adanya wacana pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.<sup>21</sup> Terlebih lanjut diketahui fakta bahwa tanah dan hutan miliknya berada di dalam wilayah IKN. Di samping itu, Presiden Prabowo Subianto yang merupakan salah satu investor IKN ini memiliki adik kandung seorang pemilik perusahaan ternama bernama Arsari Group. Hashim mengelola beragam proyek di kawasan IKN melalui korporasinya, Arsari Group. Pada tahun 2007, ia mengakuisisi lahan seluas 265.000 hektar dari perusahaan kehutanan asal Amerika Serikat.

Saat ini, terdapat empat proyek strategis yang tengah atau akan dijalankan oleh Hashim di sekitar IKN. Pertama, proyek penghijauan kembali di area seluas 172.000 hektare. Kedua, proyek energi nabati yang bekerja sama dengan perusahaan asal AS, LanzaTech. Ketiga, pelestarian fauna di kawasan hutan seluas 19.000 hektare, termasuk konservasi orang utan dan spesies lainnya. Keempat, proyek distribusi air bersih yang sebelumnya telah mengalir

ke sejumlah kota di Kalimantan Timur, seperti Balikpapan dan Samarinda. Selain itu, Arsari Group telah memperoleh izin dari pemerintah untuk mengelola pusat perlindungan orang utan di Kalimantan Timur yang lokasinya berdekatan dengan IKN.

Di samping itu juga, Sebuah laporan investigasi yang diterbitkan bersama Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan tujuh jaringan advokasi lainnya memaparkan realitas kompleks di kawasan calon Ibu Kota Negara (IKN) baru. Temuan ini menampilkan dinamika yang melibatkan kepentingan pertambangan, konsesi lahan, serta tantangan lingkungan dan sosial.<sup>22</sup> Presiden Jokowi mengumumkan pemindahan IKN ke Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) dengan total luas wilayah mencapai 180.965 hektare.

Wilayah ini terbagi dalam tiga ring utama. Akan tetapi, sebelum ditetapkan sebagai IKN, Kalimantan Timur sudah menghadapi persoalan serius dengan lubang tambang, yang telah merenggut nyawa 36 orang. Sebanyak 1.735 lubang tambang telah dipilih oleh JATAM Kaltim, namun kerap kali reklamasi diabaikan karena dianggap mahal oleh perusahaan tambang, yang lebih mengutamakan keuntungan.

Terlihat jelas bahwa wilayah yang direncanakan sebagai Ibu Kota Negara

<sup>21</sup> CNBC Indonesia. (2022, February 09). Garap Proyek Fantastis, Segini Lahan Adik Prabowo di IKN!. Retrieved 25 November 2024 from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220209/072600-4-313915/garap-proyek-fantastis-segini-lahan-adik-prabowo-di-ikn>

<sup>22</sup> IKN Final Report. (2019, Desember 18). Ibu kota baru buat siapa?. Retrieved 25 November 2024 from <https://trendasia.org/wp-content/uploads/2020/09/FINAL-IKN-REPORT-BAHASA-34-Hal.pdf>

(IKN) bukanlah lahan kosong yang bebas dari klaim atau kepentingan. Sebaliknya, kawasan tersebut telah lama dipenuhi berbagai izin dan konsesi yang meliputi pertambangan, kehutanan, perkebunan, hingga Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) serta konsesi bisnis lainnya. Kondisi ini menunjukkan betapa kompleks dan sarat kepentingannya wilayah tersebut sebelum difungsikan sebagai IKN.

Ada konsesi kehutanan besar yang beroperasi di wilayah tersebut. PT. International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama (PT.ITCI KU) dengan izin Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Hutan Alam (IUPHHK–HA) menguasai lahan seluas 173.395 hektar. Perusahaan ini berada tepat di ring dua IKN, dan salah satu tokoh penting di baliknya adalah Hashim Djojohadikusumo, yang juga dikenal sebagai adik kandung Prabowo Subianto, yang sekarang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Keterkaitannya ini menunjukkan bahwa terdapat tali hubungan yang membuatnya terlibat dalam proyek ini, sehingga terdapat pola dominasi oligarki dalam pengelolaan dan pembangunan kebijakan pemindahan ibukota ini. Hashim sendiri memiliki kepemilikan wilayah dan perusahaan yang terafiliasi dengan proyek ini yaitu PT ITCI Kartika Utama.

Kemudian terlihat jelas bahwa adanya dominasi konsesi di ring dua IKN tidak hanya mencerminkan akumulasi kekuasaan ekonomi, tetapi juga menunjukkan bagaimana pengaruh

politik terkait dengan strategi kepemilikan lahan. Tokoh seperti Hashim Djojohadikusumo menjadi nama yang mendominasi, dengan keterlibatan mereka dalam setidaknya 158 konsesi yang meliputi pertambangan, perkebunan sawit, dan kehutanan.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa sejak awal, transaksi ekonomi di kawasan IKN lebih menguntungkan para pemegang konsesi daripada masyarakat lokal. Terlebih lagi, ada dugaan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut akan menjadi target negosiasi pemerintah, termasuk kemungkinan pemutihan kewajiban reklamasi lubang bekas tambang yang belum dipenuhi. Dalam hal ini, proses pembangunan IKN tampak lebih sebagai upaya negosiasi ulang atas lahan-lahan yang telah dikuasai korporasi daripada benar-benar membuka peluang baru bagi masyarakat luas.

Dengan konfigurasi semacam ini, pembangunan IKN menandakan hubungan kekuasaan yang asimetris, dimana pengaruh oligarki dalam penataan ulang ruang sangat dominan. Konsep pembangunan yang seharusnya menitikberatkan pada kepentingan rakyat justru berpotensi terdistorsi oleh segelintir pemegang saham konsesi. Pemetaan ulang lahan yang sebelumnya telah terfragmentasi oleh izin-izin besar, seperti IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan PKP2B, menempatkan negara dalam posisi tawar yang lebih lemah ketika berhadapan dengan para pemilik modal.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai siapa yang benar-benar diuntungkan dari

megaproyek ini. Salah satu isu sentral adalah potensi "pemutihan" kewajiban reklamasi tambang.

Seperti diketahui, banyak perusahaan tambang yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban mereka untuk mereklamasi lahan pasca-eksploitasi, yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif. Proyek IKN dapat memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan ini untuk menghindari tanggung jawab tersebut melalui negosiasi yang menguntungkan mereka.

Selain itu, kehadiran perusahaan-perusahaan besar di sekitar IKN menampilkan pola akumulasi modal yang ada. Sumber daya alam yang seharusnya menjadi aset publik yang dikelola dengan orientasi keuntungan segelintir elit.

Hashim Djojohadikusumo, yang memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Prabowo Subianto memperkuat dugaan-dugaan adanya konsentrasi kekuasaan yang dimiliki oleh segelintir kelompok yang memiliki kepentingan. Dengan adanya keterlibatan Hashim serta korporasi miliknya membuat kebijakan pemindahan ibukota ini dirasa untuk kepentingan bisnis keluarga Prabowo. Tentu terdapat kekhawatiran ketika suatu bisnis yang terafiliasi oleh adik Presiden dalam proyek kebijakan pembangunan ibu kota baru ini dapat menciptakan situasi meningkatnya kecurigaan adanya konsentrasi kekuasaan yang coba dibangun.

Sebagai Komisaris Utama PT. ITCI KU, ia memegang posisi kunci dalam pengelolaan lahan yang masuk ke

dalam wilayah IKN. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa pembangunan IKN adalah cerminan dominasi oligarki yang bertumpu pada konsolidasi lahan dan sumber daya alam untuk kepentingan elit politik dan ekonomi. Pada akhirnya, proyek IKN tidak hanya menjadi simbol transfer pemerintahan, tetapi juga menjadi representasi bagaimana kekuatan modal dan politik berkolaborasi dalam mengatur ulang tata ruang.

Dengan teori elitisme, tentu menggambarkan kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini, ketika penguasa melibatkan orang-orang terdekatnya dalam pengelolaan dan pembangunan suatu kebijakan. Penguasa mencoba membangun kekuasaan politiknya dengan melibatkan orang terdekat seperti keluarga. Ketika Hashim melibatkan korporasinya tentu ranah politik ini menjadi ranah bisnis yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara ekonomi.

Selain itu, tahap formulasi kebijakan juga tidak melibatkan masyarakat secara langsung. terdapat persepsi yang terkonstruksi di masyarakat bahwa kebijakan ini bukan berorientasi pada rakyat, akan tetapi berorientasi pada kepentingan-kepentingan politik maupun ekonomi para elit. Selain itu, penelitian ini juga melihat bahwa dalam pengambilan keputusan ini, pemerintah mengabaikan dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan ibukota baru.

Pemerintah mengabaikan masyarakat lokal tanpa adanya ruang

diskusi yang inklusif. Dengan hal inilah kebijakan ini tentu merugikan masyarakat lokal dan lingkungan. Masyarakat lokal dirugikan dalam hal tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan ini, akan tetapi masyarakat harus berada pada kondisi mau tidak mau masyarakat harus menerima keputusan atas kebijakan yang diambil pemerintah. Sedangkan dalam lingkungan, tentu dengan pembangunan di bekas hutan di Kalimantan yang seharusnya menjadi nyawa dari masyarakat lokal atau bahkan dunia harus menerima bahwa lingkungan yang seharusnya dijaga, namun dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan ekonomi tanpa adanya keterbukaan kepada masyarakat.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini memberikan gambaran mengenai keterlibatan aktor elit dalam pengambilan kebijakan publik, dengan fokus pada Hashim Djojohadikusumo dalam transmisi Ibu Kota Negara (IKN). Keterlibatan Hashim melalui kepemilikan HPH dan HGB di kawasan IKN merepresentasikan dominasi oligarki dalam pengelolaan proyek strategis.

Penelitian menunjukkan bahwa Hashim tidak hanya berperan sebagai pengusaha, tetapi juga sebagai aktor politik yang berpengaruh, mengingat posisinya sebagai adik Presiden Prabowo Subianto. Proyek transfer IKN lebih berorientasi pada keuntungan kelompok tertentu dan merugikan ekologis

masyarakat lokal serta menimbulkan kerugians.

Penelitian ini menggunakan teori elitisme Wright Mills untuk memetakan pengaruh kekuatan ekonomi-politik dalam strategi kebijakan, meskipun memiliki kekurangan dalam hal dampak sosial dan lingkungan di tingkat masyarakat lokal.

Dengan demikian, pemindahan IKN mencerminkan praktik oligarki yang memperkuat dominasi elit dalam kebijakan strategis nasional, dan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan transparansi serta pelibatan masyarakat lokal. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong reformasi dalam kebijakan publik yang lebih adil dan partisipatif.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (edisi revisi). Bandung: ALFABETA, page 97.
- Asmorowati, S., Husniati, C., & Ayu, D. R. (2023). PERAN POLICY ENTREPRENEUR DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), 202-206.
- CNBC Indonesia. (2022, February 09). *Garap Proyek Fantastis, Segini Lahan Adik Prabowo di IKN!*. Retrieved 25 November 2024 from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220209072600-4-313915/garap-proyek-fantastis-segini-lahan-adik-prabowo-di-ikn>

- Detiknews. (2022, Januari 19). Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak Pemindahan Ibu Kota: UU IKN Cacat Prosedural. Retrieved 23 November 2024 from <https://news.detik.com/berita/d-5906003/koalisi-masyarakat-kaltim-tolak-pemindahan-ibu-kota-uu-ikn-cacat-proseduralll>
- IKN Final Report. (2019, Desember 18). Ibu kota baru buat siapa?. Retrieved 25 November 2024 from <https://trendasia.org/wp-content/uploads/2020/09/FINAL-IKN-REPORT-BAHASA-34-Hal.pdf>
- Islamy, Irfan, Muhammad. (2014). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, (Jakarta: PT Bumi Aksara), h. 24.
- Komnas, H. A. M. Kertas Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru dalam Perspektif Kota Hak Asasi Manusia. Komnas HAM.
- Leonard Whibley. (1896). Greek Oligarchies Their Character And Organisation, Methuen & Co, Newyork, page 18.
- Lembaga Peradaban Luhur. (2022, April 24). Menggugat UU IKN, dari Hak Adat Sampai Kerusakan Lingkungan. Retrieved 25 November 2024 from <https://www.peradabanluhur.or.id/menggugat-uu-ikn-dari-hak-adat-sampai-kerusakan-lingkungan/>
- Maftuh, M. (2023). ANATOMI TEORI ELIT KEKUASAAN C. WRIGHT MILLS. MIYAH: Jurnal Studi Islam, 19(02), 227.
- Moleong. (1989). Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Karya.
- Project Multatuli. (2022, Agustus 1). Nestapa Suku Balik: Dulu Hutannya Digunduli, Kini Hidupnya Digusur IKN. Retrieved 23 November 2024 from <https://projectmultatuli.org/nestapa-suku-balik-dulu-hutannya-digunduli-kini-hidupnya-digusur-ikn/>
- Wahyuni, W. (2022, March 3). Pemilu 2024 dan ciri-ciri sistem pemerintahan oligarki. Hukumonline. Retrieved 23 November 2024 from <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-jenis-oligarki-lt63dc73d43f631/>
- Prijanto Rabani. (2023, September 8). Opini “Pemerintahan Oligarki, Aristoteles dan Jeffrey Winters”. gokepri.com. Retrieved 23 November 2024 from <https://gokepri.com/pemerintahan-oligarki-aristoteles-dan-jeffrey-winters/>
- Nadila, R. (2024). Displacement and Gentrification in Borneo – The Political Ecology of Indonesia’s New Capital City. Uppsala University, Faculty of Medicine, Master's Program in Implementation Science, Transformational Learning and Sustainability, h 5-6

Tempo. (2022, Januari 29). Koalisi Sebut Nama Adik Prabowo dalam Perusahaan Pemegang Konsesi 173 Ribu Hektare di IKN. Retrieved 23 November 2024 from <https://www.tempo.co/ekonomi/koalisi-sebut-nama-adik-prabowo-dalam-perusahaan-pemegang-konsesi-173-ribu-hektare-di-ikn-430702>

Tempo. (2024, Agustus 13). Prabowo Mengaku Investor, Hashim Djojohadikusumo Punya Proyek di IKN. Retrieved 23 November 2024 from <https://www.tempo.co/ekonomi/prabowo-mengaku-investor-hashim-djojohadikusumo-punya-proyek-di-ikn-26073>

TrendAsia. (2020, September 13). Ibu Kota Baru Buat Siapa?. Retrieved 23 November 2024 from <https://trendasia.org/ibu-kota-baru-buat-siapa/>

